



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI SETIAWAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 975996

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.010.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m²/110 m² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 408 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN MERANTI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 80.000.000
4. Tanah Seluas 4.22 m² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 318 m²/110 m² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 186 m² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 408 m² di KAB / KOTA KEPULAUAN MERANTI, Rp. 80.000.000
8. Tanah Seluas 4.22 m² di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 26.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SCOOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



2. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.512.416
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.064.912.416
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.064.912.416

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.